



Yogyakarta Kota Terbersih Korupsi

JAKARTA (SINDO) – Survei yang dilakukan Transparency International (TI) Indonesia menempatkan Yogyakarta sebagai kota paling bersih dari korupsi.

Yogyakarta menempati peringkat pertama dari 50 kota di Tanah Air yang disurvei TI Indonesia. Nilai plus Yogyakarta ditengarai karena ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah membentuk dinas perizinan sebagai pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sejak 2006.

bersambung ke hal 7

Yogyakarta Kota Terbersih Korupsi

sambungan dari hal 1

“Indeks persepsi korupsi (IPK) pemerintahan Kota Yogyakarta menempati poin paling tinggi. Pelaku bisnis di kota ini menilai Yogyakarta cukup bersih dan cukup serius dalam usahanya memberantas korupsi,” kata Manajer Riset dan Kebijakan TI Indonesia Frenky Simanjuntak saat presentasi hasil survei di Jakarta kemarin.

Menurutnya, survei yang dilakukan pada September–Desember 2008 itu untuk mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah (pemda) berdasarkan persepsi pelaku bisnis setempat melibatkan 3.841 responden. Sebanyak 2.371 responden berasal dari pelaku bisnis, 396 responden tokoh masyarakat, dan sisanya 1.074 responden merupakan pejabat publik.

Jika Yogyakarta sebagai kota terbersih dari korupsi mencatat skor 6,43, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menempati posisi paling buncit di antara 50 kota di Indonesia dengan skor 2,97. Juga masuk kategori korup. Menurut Frenky, kota-kota yang masuk kategori korup menunjukkan bahwa masih banyak pelaku bisnis yang kecewa atas pelayanan publik di wilayah tersebut.

“Pemda juga ditengarai tidak serius dalam usaha memberantas korupsi,” tandasnya.

Meski Yogyakarta mendapatkan skor rata-rata skor IPK di seluruh Tanah Air masih di bawah 5, yakni 4,42. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di pemerintah daerah (pemda) masih tinggi. “Namun, kita tetap optimistis akan ada perbaikan dari pemda. Pasalnya, dibanding sebelumnya skor IPK-nya masih rendah yakni 2,6, yang berarti tingkat korupsi sangat tinggi,” paparnya.

TI Indonesia juga mengukur indeks suap 15 institusi publik di Indonesia. Indeks suap ini menggambarkan tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi publik berdasarkan pengalaman kontak antarpelaku bisnis dengan institusi terkait. Indeks suap hasil survei TI Indonesia masih menempatkan polisi sebagai institusi paling korup mencapai 43%.

Menanggapi survei TI Indonesia, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Abubakar Nataprawira mengatakan, jika informasi tersebut benar, itu akan menjadi introspeksi buat Polri. Namun, dia mempertanyakan metode penelitian yang dilakukan. Dia meminta jika TI Indonesia punya data di bidang apa saja suap yang melibatkan polisi, itu perlu disampaikan ke Polri.

(sofian dwi/helmi syarif)

Dihaturkan Kepada

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dharma Wanita Persatuan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005